

## Pelatihan Administrasi Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Biak Numfor

Asmadianto<sup>1</sup>, Irsat<sup>2</sup>, Rani Maswati<sup>3</sup>, Ediyanto<sup>4</sup>, Hamjah Bonso<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Administrasi, IISIP Yapis Biak, Papua;

### Abstrak

Administrasi desa yang tertib dan profesional menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan administrasi desa, terutama karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Biak Numfor dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, simulasi dokumen administrasi, dan praktik langsung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam tata kelola administrasi desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Kata kunci:** *Administrasi Desa, Aparatur Desa, Tata Kelola, Pelatihan, Biak Numfor*

### Abstract

*Orderly and professional village administration is a key pillar in effective village governance. However, various obstacles still hinder its implementation, mainly due to the limited knowledge and skills of village officials. This training activity aims to improve the capacity of village government officials in Biak Numfor Regency in managing administrative tasks. The implementation methods include material delivery, document simulation, and hands-on practice. The results show improved participant understanding in administrative governance in accordance with legal provisions.*

**Keywords:** *Village Administration, Village Officials, Governance, Training, Biak Numfor*

## PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi di tingkat lokal. Administrasi desa yang baik akan menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki peran strategis sebagai entitas pemerintahan yang

langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga tata kelola administrasi desa harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Biak Numfor, masih ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi aparatur desa dalam menjalankan tugas administrasi. Minimnya pelatihan teknis, kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta terbatasnya sumber daya menjadi faktor penghambat utama. Ketidaksihinggaan

format administrasi dan lemahnya dokumentasi menyebabkan potensi penyalahgunaan anggaran dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa.

Urgensi inilah yang mendorong dilaksanakannya kegiatan pelatihan administrasi desa oleh tim dari Program Studi Ilmu Pemerintahan IISIP Yapis Biak. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya profesionalitas dan tanggung jawab aparatur dalam mengelola tata kelola pemerintahan desa. Dengan harapan, desa dapat menjadi institusi yang efisien, responsif, dan akuntabel di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Untuk itu, tata kelola administrasi desa yang tertib, transparan, dan akuntabel sangat dibutuhkan dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintah desa. Sayangnya, masih banyak aparatur desa di Kabupaten Biak Numfor yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan administrasi secara memadai.

Masalah yang sering muncul di lapangan antara lain pencatatan dokumen yang tidak rapi, kesalahan dalam penyusunan laporan, hingga minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan administrasi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat serta lemahnya akuntabilitas kinerja pemerintahan desa.

Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan administrasi, mulai dari surat menyurat, penyusunan laporan keuangan desa, hingga dokumentasi kegiatan pembangunan. Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi akademik Program Studi Ilmu Pemerintahan IISIP Yapis Biak dalam mendorong profesionalitas pemerintahan desa.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi ceramah interaktif, studi kasus, dan praktik langsung. Materi pelatihan mencakup prinsip dasar administrasi pemerintahan desa,

penyusunan dokumen resmi, pengelolaan arsip, dan pelaporan keuangan desa. Pelatihan dilaksanakan di Kantor Distrik Biak Timur selama dua hari, dengan melibatkan 20 peserta yang berasal dari beberapa kampung di wilayah tersebut.

Sesi praktik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengisi formulir administrasi, membuat surat keputusan kepala kampung, serta menyusun laporan kegiatan pembangunan desa. Evaluasi dilakukan melalui kuisioner dan review hasil kerja peserta. Pendampingan juga diberikan selama kegiatan untuk memastikan pemahaman dan keterampilan peserta meningkat secara merata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama pada sesi praktik pengisian dokumen dan penyusunan surat resmi. Beberapa peserta mengaku baru pertama kali memahami format penulisan surat menyurat sesuai ketentuan administrasi desa. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri peserta dalam menjalankan tugas administratif mereka di kampung masing-masing.

Dalam diskusi kelompok, muncul berbagai permasalahan riil yang sering dihadapi aparatur desa, seperti tumpang tindih arsip, ketidaktahuan tentang mekanisme pelaporan keuangan, dan ketidakjelasan struktur dokumen desa. Melalui fasilitasi narasumber, peserta diajak untuk menyusun solusi sederhana yang dapat diterapkan sesuai kondisi kampung masing-masing. Ini mendorong proses pembelajaran yang aktif dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Adanya praktik langsung menyusun laporan kegiatan dan keputusan kepala kampung membuat peserta lebih memahami pentingnya keterampilan administratif dalam mendukung transparansi pemerintahan desa. Beberapa peserta bahkan mengusulkan agar pelatihan semacam ini dapat dijadikan program berkelanjutan dengan materi yang diperluas mencakup digitalisasi arsip dan sistem informasi desa.

Dampak jangka pendek dari kegiatan ini terlihat dari adanya komitmen bersama antar peserta untuk menerapkan hasil pelatihan dan menyebarkan pengetahuan kepada rekan sejawat di kampung mereka. Ini menandakan bahwa kegiatan pelatihan tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga berpotensi mendorong perubahan budaya kerja administrasi desa yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

Hasil dari pelatihan menunjukkan bahwa para peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap prosedur administrasi desa, terutama dalam hal pencatatan surat keluar/masuk dan penyusunan laporan kegiatan. Peserta yang sebelumnya tidak memahami struktur surat dinas kini mampu menyusun surat resmi dengan format yang benar.

Sesi praktik menjadi momen yang sangat membantu karena peserta dapat langsung menerapkan materi dalam contoh kasus yang relevan. Beberapa peserta juga menunjukkan inisiatif dengan membuat format administrasi sederhana yang akan digunakan di kampung masing-masing. Kegiatan ini juga membangun semangat kolaboratif antar aparatur desa dalam berbagi pengalaman dan solusi administratif.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pelatihan yang bersifat teknis-praktis sangat dibutuhkan oleh aparatur desa agar lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Dengan pemahaman administrasi yang baik, pemerintahan desa dapat menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan secara lebih efektif dan akuntabel.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelatihan administrasi desa ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan teknis aparatur pemerintah desa di Kabupaten Biak Numfor. Pemahaman terhadap tata kelola administrasi yang benar mendorong kinerja pemerintahan desa menjadi lebih profesional.

Diperlukan pelatihan lanjutan secara berkala dengan cakupan materi yang lebih luas, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam administrasi desa. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan

berkelanjutan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor IISIP Yapis Biak, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta LPPM IISIP Yapis Biak atas dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## **Daftar Pustaka**

- Arifin, S. (2021). *Administrasi Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Departemen Dalam Negeri. (2015). *Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Harahap, A. (2020). Profesionalitas Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 65–72.
- Kurniawan, T. (2019). Implementasi Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 110–120.
- Marbun, J. (2018). *Manajemen Administrasi Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Wulandari, F. (2022). Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Melalui Pelatihan Administrasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 32–40.